



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1141 /MENKES/SK/VIII/2003**

TENTANG

**PENERIMA DANA PKPS-BBM BIDANG KESEHATAN PADA DAERAH UJICOBA
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KELUARGA MISKIN (JPK-GAKIN)
TAHUN ANGGARAN 2003**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 mengamanatkan agar subsidi energi dikurangi secara bertahap sehingga pada akhir Tahun 2004 tidak ada lagi subsidi energi, dana subsidi tersebut dapat dipergunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat secara lebih tepat;
 - b. bahwa dalam rangka menanggulangi dampak dari pengurangan subsidi energi tersebut pada aspek kesehatan, ditetapkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES);
 - c. bahwa pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin perlu memperhatikan sustainabilitas, kelembagaan yang mantap dan akuntabilitas.
 - d. bahwa untuk itu diperlukan pengembangan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin)
 - e. bahwa agar dapat dijadikan sebagai landasan dalam penyaluran dana bagi masyarakat melalui sistem pemeliharaan kesehatan keluarga miskin (JPK-Gakin), ditetapkan Penerima Dana PKPS-BBM BIDKES Pada Daerah Ujicoba Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) Tahun Anggaran 2003
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 571/MENKES/PER/VII/1993 Tentang Jaminan Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat;
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Proyek Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan Nomor 001/XXIV/1/--/2003 tertanggal 2 Januari 2003, dengan Kode Proyek 13.2.02.667722.24.01.001;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-108/A/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang Petunjuk Penyaluran dan Pencairan Dana Program Pengurangan Subsidi BBM Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) TA 2003.
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 781/MENKES/SK/VI/2003 tentang Penetapan Daerah Ujicoba Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) Dalam PKPS-BBM BIDKES 2003.
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1099/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penerima Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) TA 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Penerima Dana PKPS-BBM Bidang Kesehatan Pada Daerah Ujicoba Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) Tahun Anggaran 2003, dengan ketentuan sbb :
- Pertama : Penerima Dana PKPS-BBM Bidang Kesehatan Pada Daerah Ujicoba Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) Tahun Anggaran 2003 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Kedua : Dana PKPS-BBM BIDKES pada daerah Ujicoba JPK-Gakin dibebankan kepada DIP Proyek Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan Nomor 001/XXIV/1/--/2003 tertanggal 2 Januari 2003, dengan Kode Proyek 13.2.02.667722.24.01.001.
- Ketiga : Pengelolaan Dana PKPS-BBM Bidang Kesehatan Pada Daerah Ujicoba Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) Tahun Anggaran 2003 mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES) Pada Daerah Ujicoba Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin).
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 8 Agustus 2003



MENTERI KESEHATAN, *[-*

[-
Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Gubernur di seluruh Indonesia;
8. Bupati / Walikota di seluruh Indonesia;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Para Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan;
11. Pimpro / Pimbagpro yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENKES RI
NOMOR : 1141/MENKES/SK/VIII/2003
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2003

No Urut	PENERIMA DANA	ALOKASI	DANA MENURUT ASAL BAGIAN PROYEK		KPRK KOORDINATOR
			01	02	
1	Dinkes Propinsi DKI Jakarta	21,702,000,000	19,950,000,000	1,752,000,000	Jakarta Pusat
2	Dinkes Propinsi D.I. Yogyakarta	13,207,477,000	9,331,477,000	3,876,000,000	Yogyakarta
3	Dinkes Kab. Purbalingga	2,583,000,000	674,000,000	1,909,000,000	Purbalingga
4	Dinkes Kab. Rembang	1,736,094,000	570,094,000	1,166,000,000	Pati
5	Dinkes Kab. Pati	3,242,142,000	954,142,000	2,288,000,000	Pati
6	Dinkes Kota Medan	3,496,316,000	2,247,316,000	1,249,000,000	Medan
7	Dinkes Kab. Deli Serdang	2,727,451,000	343,451,000	2,384,000,000	Tebing Tinggi
8	Dinkes Kota Payakumbuh	611,205,000	510,205,000	101,000,000	Payakumbuh
9	Dinkes Kab. Musi Banyuasin	1,996,631,000	432,631,000	1,564,000,000	Palembang
10	Dinkes Kota Balikpapan	1,454,000,000	998,000,000	456,000,000	Balikpapan
11	Dinkes Kab. Klungkung	474,589,000	362,589,000	112,000,000	Gianyar
12	Dinkes Kab. Jembrana	513,589,000	362,589,000	151,000,000	Tabanan
13	Dinkes Kab. Lombok Barat	4,544,000,000	-	4,544,000,000	Mataram
14	Dinkes Kab. Sumba Timur	2,613,000,000	450,000,000	2,163,000,000	Waingapu
15	Dinkes Kota Cilegon	558,182,000	276,182,000	282,000,000	Cilegon
	TOTAL	61,459,676,000	37,462,676,000	23,997,000,000	



MENTERI KESEHATAN

Dr. ACHMAD SUJUDI

Keterangan :

01 : Proyek Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (Rujukan)

02 : Bagian Proyek Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (Dasar)